



IMPLEMENTASI INOVASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) 2.0 DALAM PENGELOLAAN DANA ALOKASI DESA DI DESA RUPE, KECAMATAN LANGGUDU, KABUPATEN BIMA

Thareq Kemal

Mahasiswa Magister Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana Univeristas Teknologi Sumbawa

Email : thareqkemal86@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 22 Juni 2022

Disetujui : 24 Juni 2022

Dipublikasikan : 25 Juni 2022

ABSTRAK

Kata Kunci :
*Sistem
Keuangan
Desa
(Siskeudes);
Implementasi
Kebijakan,
Keuangan
Desa, George
C. Edward III,
Alokasi Dana
Desa, E-
Government,
Desa Rupe,
Kecamatan
Langgudu,
Kabupaten
Bima*

Aplikasi SISKEUDES 2.0 merupakan aplikasi yang digunakan pemerintahan desa untuk melaporkan dana desa, namun masih banyak permasalahan pada implementasi aplikasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi Aplikasi Siskeudes. Studi Di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini merupakan studi mengenai penerapan *electronic government* (e-Government). Fokus penelitian diarahkan pada implementasi kebijakan penerapan aplikasi system keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan Dana Alokasi Desa (ADD). Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian studi kasus. Pada penelitian ini, model implementasi kebijakan menurut George Edward III digunakan sebagai alat analisa. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penerapan aplikasi system keuangan desa di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Siskeudes 2.0 kurang efektif, karena masih terdapat beberapa permasalahan pada sumber daya yang ada untuk mendukung implementasi aplikasi Siskeudes 2.0. Selain itu juga didukung belum kurang efektifnya kinerja aparatur dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes dikarenakan minimnya pengetahuan dan kemampuan dibidang teknologi Informasi dan komputer.

ABSTRACT

Keywords :
*Village
Financial System
(Siskeudes);
Policy
Implementation,
Village Finance,
George C.
Edward III,
Village Fund
Allocation, E-
Government,
Rupe Village,
Langgudu
District, Bima
Regency*

The SISKEUDES 2.0 application is an application used by village governments to report village funds, but there are still many problems in implementing the application. This study aims to see the implementation of the Siskeudes Application. Study in Rupe Village, Langgudu District, Bima Regency, West Nusa Tenggara Province. This research studies the application of electronic government (e-Government). The focus of the research is directed at the implementation of policies on the application of the village financial system (Siskeudes) in the management of the Village Allocation Fund (ADD). This type of research uses qualitative research with case study research. In this study, the model of policy implementation according to George Edward III is used as an analytical tool. Collecting data using interviews, observation, and documentation studies. The results showed that the implementation of the policy on implementing the village financial system application in Rupe Village, Langgudu District, Bima Regency showed that the implementation of the Siskeudes 2.0 application was less effective because there were still some problems with the existing resources to support the implementation of the Siskeudes 2.0 application. In addition, it is also supported by the lack of adequate performance of the apparatus in operating the Siskeudes application due to the lack of knowledge and skills in the field of information technology and computers.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bias menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas'. Sebelum aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) diluncurkan, sebagian besar desa membuat anggaran, pembukuan, dan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel atau aplikasi lain yang formatnya tidak standar. Hal ini menyulitkan pemerintah kabupaten/kota dalam mengevaluasi APBDes dan laporan keuangan desa. Selain itu, ada ratusan desa yang menggunakan aplikasi yang dibeli dari pengembang swasta, yang tidak dapat diperbarui untuk memenuhi standard standard regulasi.

SISKEUDES dikembangkan oleh BPKP dengan pendekatan pemerintah daerah, sehingga memudahkan dalam proses kompilasi laporan keuangan seluruh desa menjadi lampiran LKPD sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembinaan implementasinya melalui pengaturan pengaturan yang sesuai dengan regulasi. Aplikasi SISKEUDES telah mengakomodir seluruh regulasi terkait dengan keuangan desa, dirancang secara terintegrasi, user friendly, dan desktop application serta memiliki system pengendalian intern yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. Hal ini tentunya akan memberikan rasa nyaman bagi pengelola keuangan di desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Firdausy, Suryana, Nugroho, &Suhartoko, 2019).

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Siskeudes dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes (Puspasari&Purnama, 2018).

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib untuk menyusun laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangandes. (Jamaluddin, Sumaryana, Rusli, &Buchari, 2018)

Perwujudan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan public terhadap kinerja keuangan pemerintah, saat ini telah menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan Negara. Pengelolaan keuangan desa juga semakin dituntut untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, namun pada kenyataannya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih dalam kategori rendah. Rendahnya akuntabilitas dapat mengakibatkan kegagalan administrasi, miskin keputusan politik, dan tingginya tindakan korupsi. Pengawasan Keuangan Desa yang dilakukan oleh BPKP sendiri bertujuan untuk memastikan seluruh

ketentuan dan kebijakan dalam mengimplementasikan UU Desa khususnya keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh tingkatan pemerintahan baik tingkat Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa sesuai dengan perannya masing masing. Khusus untuk tingkat desa, pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan. Jika berhasil dilaksanakan dengan baik maka pengawalan desa akan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu Good Village Governance (Pratiwi&Pravasanti, 2020).

Pengembangan Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun system keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Malahika, Karamoy, & Pusung, 2018).

Kajian tentang Pengelolaan Keuangan Desa oleh KPK memperoleh hasil bahwa terdapat potensi korupsi dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat dilihat dari masalah tata laksana yaitu kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa, transparansi rencana penggunaan dan pertanggung jawaban APBDesa masih rendah dan laporan pertanggung jawaban yang dibuat desa belum sepenuhnya mengikuti standar dan rawan manipulasi (Munti, 2017). Fenomena yang ada di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, penerapan SISKUDES terdapat permasalahan pada komunikasi, sumber daya manusia yang kurang memumpuni, sehingga implementasi aplikasi SISKEUDES kurang efektif.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dalam siklus kebijakan. (Dunn, 1999) mengemukakan bahwa karakteristik dalam implementasi kebijakan yaitu bahwa “kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia” (Dunn, 1999). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa dalam tahapan implementasi, aktor-aktor di tingkat yang lebih teknis (pemerintah desa) memegang peranan penting karena tugasnya sebagai operator dan eksekutor. Untuk meneliti implementasi kebijakan penerapan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan Alokasi Dana Desaini, peneliti menggunakan pendekatan top down karena kebijakan ini disusun dan ditetapkan oleh pemerintah di level yang lebih atas dari pemerintah desa. Salah satu model implementasi kebijakan yang berperspektif top down adalah model implementasi kebijakan dari George C. Edward III.

Model yang dikemukakan oleh Edward III ini digunakan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Pada model implementasi kebijakan (Edward III, 1980) terdapat empat aspek yang saling mempengaruhi dan berdampak pada pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan, diantaranya yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Mengenai penjelasan masing-masing aspek tersebut, disarikan dari (Edward III, 1980) adalah sebagai berikut :

Pertama, aspek komunikasi berkaitan dengan proses penyampaian informasi kebijakan dari penyusun kebijakan kepada pelaksana kebijakan dengan tujuan kebijakan dapat dipahami oleh para pelaksana kebijakan. Komunikasi yang dijalankan pada proses

implementasi kebijakan perlu memperhatikan tiga aspek penting yaitu transformasi informasi (transmisi) agar seluruh stake holder kebijakan memahami kebijakan, kejelasan informasi (clarity) agar tidak terjadi salah tafsir atau salah interpretasi diantara para pelaksana kebijakan, dan konsistensi informasi (consistency) agar tidak terjadi kebingungan pada para pelaksana kebijakan.

Kedua, aspek sumber daya mencakup seluruh sarana baik sumber daya manusia, peralatan maupun pembiayaan. Kuantitas dan kualitas sumber daya akan mempengaruhi jalannya proses implementasi kebijakan. Pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan perlu didukung oleh sumber daya yang memadai.

Ketiga, aspek disposisi dapat diartikan sebagai kecenderungan perilaku yang ditunjukkan oleh para pelaksana kebijakan untuk mewujudkan pencapaian tujuan kebijakan. Pada aspek ini, karakter penting yang perlu dimiliki oleh para pelaksana kebijakan yaitu kejujuran dan komitmen yang tinggi sehingga terlihat antusias para implementor ketika melaksanakan wewenang, tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai aturan dan ketentuan kebijakan yang dijalankan. Kecenderungan sikap dari para implementor ini akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Keempat, aspek struktur birokrasi juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Pada aspek ini melingkupi dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur birokrasi (organisasi). Aspek mekanisme biasanya tercakup dalam Standard Operation Procedure (SOP) yang menjadi panduan bagi setiap pelaksana kebijakan dalam bertindak pada proses implementasi kebijakan. Kepatuhan pada SOP akan menjadikan peluang keberhasilan implementasi kebijakan lebih dapat tercapai dengan baik. Aspek selanjutnya yaitu struktur birokrasi, bentuk dan pola dari struktur birokrasi ini akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang panjang dan terfragmentasi akan menyebabkan aktifitas organisasi menjadi tidak fleksibel sehingga pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan menjadi sulit tercapai. Selain itu, rentang struktur birokrasi yang panjang ini juga akan cenderung melemahkan pengawasan dan menjadi kerumitan dalam aspek prosedur yang harus dijalankan.

Pentingnya pemahaman aparat pemerintah Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima dalam mengimplementasikan Aplikasi Siskeudes 2.0 sangat penting, karena aparat pemerintah desa sebagai pelaksana aplikasi tersebut, oleh karena itu aparat pemerintah desa dituntut melek teknologi informasi guna menyukseskan penerapan aplikasi SISKEUDES 2.0. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada implementasi SISKEUDES 2.0 di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima dengan menggunakan model implementasi Edward III untuk melihat bagaimana komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi pada penerapan aplikasi SISKEUDES 2.0.

METODE

Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini yakni menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif pada Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. Ahli Bogdan Taylor (Maleong, 2012) menjelaskan bahwa metode kualitatif yaitu tahapan penelitian yang dapat menghasilkan jenis data deskriptif yakni mencakup penjelasan kalimat tertulis maupun lisan dari individu serta dari perbuatan yang dapat diamati.

Lokasi Penelitian

Lokasi tempat penelitian berada di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2022.

Jenis Data

Pada penelitian ini, partisipan penelitian terdiri dari perangkat desa yang merencanakan dan memiliki tugas pengelolaan system keuangan desa di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. Wawancara dilaksanakan secara offline. Pengumpulan data lainnya yaitu pada studi dokumentasi, peneliti lakukan dengan menelaah dokumen-dokumen baik berbentuk catatan, gambar atau audio visual yang memiliki keterkaitan dengan topic penelitian. Data yang terkumpul kemudian peneliti analisis dengan menggunakan model analisa dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Miles & Huberman, 1992)

Penelitian menggunakan dua jenis data yang meliputi:

1. Data Primer: yakni berupa data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan melalui wawancara dan observasi langsung di Kantor Desa Rupe, kecamatan langgudu, kabupaten Bima dan
2. Data Sekunder : yakni berupa studi pustaka dengan mengumpulkan dokumen serta artikel yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi aplikasi Siskeudes 2.0 di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima berdasarkan analisis implementasi menggunakan model edward III bahwa indicator komunikasi masih cukup efektif antara pelaksana program SISKEUDES 2.0 yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara, Pelaksana Teknis dan BPD. Untuk indicator sumber daya masih terdapat permasalahan pada sarana dan prasarana yang masih kurang maksimal yang ada di Desa Rupe dalam implementasikan aplikasi SISKEUDES 2.0. Hal ini merupakan salah satu kelemahan yang ada di desa-desa yang ada di Kabupaten Bima yang saat ini masih banyaknya desa-desa yang minimnya sarana dan prasarana pendukung untuk mengimplementasikan aplikasi SISKEUDES 2.0.

Komunikasi dalam implementasi Aplikasi Siskeudes 2.0

Pada aspek komunikasi, implementasi penggunaan aplikasi Siskeudes di Desa Rupe berlangsung secara dinamis. Partisipan penelitian selaku salah satu perangkat desa mengemukakan bahwa: “Jadi perencanaan ADD berawal dari kesepakatan musyawarah dusun (MusDus) dan musyawarah desa (MusDes). Jika setuju dari pihak dari RT/pemerintah desa, staff, serta kepala desa disetujui dan diverifikasi oleh sekretaris desa maka kegiatan ADD itu dimasukkan kedalam aplikasi Siskeudes.”(23/5/2022)

Partisipan lain nya mengatakan: “Sejak aplikasi Siskeudes diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan desa harus berkoordinasi dengan pihak BPD dalam menetapkan dan perubahan APBDes selama 3-5 kali dalam setahun. Adapun pihak-pihak yang hadir dalam menetapkan APBDes yaitu masyarakat desa dan aparatur Desa Rupe, jadi komunikasi dalam pengelolaan keuangan desa terjalin dengan baik dan jelas dalam pengelolaannya, saling transparansi dalam pengelolaannya”. (23/5/2022)

Dari pernyataan-pernyataan yang diungkapkan informan atau partisipan penelitian tersebut menunjukkan bahwa aplikasi Siskeudes 2.0 digunakan sebagai media

untuk menginput rencana pembangunan desa. Sedangkan proses perencanaan pembangunan desan yaitu sendiri dilakukan melalui tahapan musyawarah dari mulai tingkat dusun hingga ketingkat desa. Dari informasi yang diungkapkan oleh partisipan juga secara implicit menunjukkan sudah adanya komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan warga melalui proses perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin cukup baik antara pemerintah desa, DPD dan masyarakat baik dalam menetapkan APBDesa ataupun dalam pembangunan-pembangunan di DesaRupe.

Pentingnya komunikasi yang baik dalam implementasi aplikasi SISKEUDES 2.0, komunikasi yang terbentuk antara kaur keuangan, sekertaris desa dan kepala desa juga harus baik karena pada saat mengimplementasikan SISKEUDES 2.0 banyak unsur yang harus diisi dalam aplikasi tersebut, ketika komunikasi tidak baik maka akan menjadi kendala pada saat pengisian aplikasi SISKEUDES 2.0. Oleh sebab itu, pada model implementasi edward III ini komunikasi menjadi salah satu indicator penting sukses tidaknya dalam implementasi suatu kebijakan atau program pemerintah.

Sumber daya dalam implementasi Aplikasi Siskeudes 2.0

Sumber daya merupakan factor penting dalam mengimplementasikan aplikasi Siskeudes 2.0, dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, sarana dan prasaran yang mendukung. Masih banyaknya sumber daya manusia yang kurang menguasai bidangnya di Desa Rupe dan minimnya sarana prasarana mengakibatkan kurang maksimalnya implementasi Aplikasi Siskeudes 2.0. Sumber daya manusia merupakan factor penggerak dalam melaksanakan suatu kegiatan khususnya pengoprasian aplikasi Siskeudes 2.0., seperti yang dikatakan oleh partisipan:

“Selama ini beluma danya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung impelementasi aplikasi Siskeudes 2.0, masih kurang dan terbatas, beberapa dari kami menggunakan laptop pribadi untuk kami gunakan untuk pelayanan masyarakat di Rupe dan terbatasnya koneksi internet juga menjadi kendala” (23/5/2022)

Selain itu juga diperkuat pendapat partisipan yaitu sebagai berikut : “Menegenai sumber daya aparatur dalam mengoperasikannya saya masih dibantu dari pendamping desa yang paham dan ahli dalam pengoperasian aplikasi Sistem Keuangan desa di karenakan agar dalam pencairan tidak tertinggal dari desa-desa lainnya”. (24/5/2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masih minimnya pengetahuan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana untuk mendukung implementasi aplikasi Siskeudes, melihat hal ini pemerintah juga tidak tinggal diam karena menurunkan pendamping desa guna memantau pembangunan desa, baik pembangunan fisik maupun non fisik (Triyanto, 2018)

Sarana dan prasarana yang masih kurang maksimal yang ada di Rupe dalam implementasikan aplikasi SISKEUDES 2.0, ini merupakan salah satu kelemahan yang ada di desa-desa yang ada di Kabupaten Bima yang saat ini masih banyaknya desa-desa yang minimnya sarana dan prasarana pendukung untuk implementasikan aplikasi SISKEUDES 2.0. oleh sebab itu perlunya pemerintah desa melakukan komunikasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang ada di Kabupaten Bima untuk dapat mengevaluasi permasalahan yang muncul supaya dapat dilakukan tindakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana. Penerapan elektronik government tidaklah mudah, apabila pemerintah ingin menerapkan pemerintah berbasis digital diperlukannya kesiapan diseluruh stake holders terkait. Khususnya pada pemerintah daerah yang kurang akan akses jaringan dan minimnya sarana dan prasarana untuk menerapkan pemerintah

berbasis digital. Oleh karena itu pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota (Harmiati, Alexsander, Triyanto, Maya, & Riastuti, 2020)

Disposisi dalam implementasi Aplikasi Siskeudes 2.0

Suatu kebijakan atau program akan berhasil dengan baik dalam implementasinya apabila didukung oleh aparat pelaksana, perilaku aparat pelaksana yang positif dan sesuai dengan prosedur dalam mengimplementasikan, penempatan atau penyusunan aparat pelaksana dilakukan berdasarkan prinsip *the right man in the right place* dan motivasi aparat pelaksana dalam bekerja sangat tinggi serta sikap masyarakat.

Demikian pula dengan implementasi aplikasi Siskeudes 2.0 akan berhasil dengan baik dalam implementasinya jika didukung oleh aparat pelaksana, perilaku aparat pelaksana yang positif dan sesuai dengan prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan, penempatan atau penyusunan aparat pelaksana dilakukan berdasarkan prinsip *the right man in the right place* dan motivasi aparat pelaksana dalam bekerja sangat tinggi serta sikap masyarakat (Harmiati, Mulyadi, Suri, & Triyanto, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor disposisi dalam implementasi aplikasi siskeudes 2.0 di Desa Rupe belum efektif, karena kurang efektifnya kinerja aparat dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes dikarenakan minimnya pengetahuan dan kemampuan dibidang teknologi Informasi dan komputer.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut salah satu partisipan penelitian dari perangkat pemerintah desa mengemukakan bahwa adanya aplikasi siskeudes ini mempersulit dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena sistem yang terlalu rumit jika dibandingkan dengan tahun 2018 saat masih offline. Partisipan penelitian tersebut mengungkapkan:

“Sebenarnya menurut saya adanya siskeudes ini bias mempermudah, mungkin setelah diadakannya online ini menurut saya terlalu rumit. Jadi di tahun 2018 itu menurut saya simple karena offline jadi tidak ada kendala terutama dalam jaringan.”

Meskipun begitu, Pemerintah Desa Rupe tetap memiliki kemauan untuk melaksanakan implementasi aplikasi siskeudes tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya program pelatihan-pelatihan untuk para pelaksana kebijakan, terutama bagian Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa, Kaur Perencanaan dan Pelaporan dan Operator Siskeudes yang menangani langsung aplikasi ini.

Struktur Birokrasi dalam implementasi Aplikasi Siskeudes 2.0

Mengenai mekanisme implementasi penerapan system keuangan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Baru, aparat desa yang ada sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing atau sudah sesuai dengan Standar Operation Procedure (SOP). Hal ini berdasarkan dengan pernyataan dari Operator Desa, yang mengungkapkan bahwa : “Tentu sudah karena masing-masing itu ada bagiannya, terutama bagian perencanaan. Untuk perencanaan itu terhubung dengan Kaur Perencanaan. Jadi dia bias bersinkronisasi dengan Kaur Keuangan dan juga operator.”

Partisipan yang juga selaku perangkat pemerintah desa juga mengungkapkan : “Tentu sudah jelas dengan prosedur yang berlaku karena aplikasi siskeudes itu adalah aplikasi yang terhubung dengan BPKP maupun kejaksaan ataupun inspektorat. Jadi, jika tidak sesuai prosedur maka itu melanggar. Jadi, jawabannya sesuai prosedur yang berlaku.”

Selain itu partisipan juga mengungkapkan : “Tahun 2017 ataupun tahun 2018 dalam implementasi proses pencairan ADD itu tidak terlalu ribet. Di tahun 2020 atau 2021 ini tentu peraturannya ini sangat ribet, karena kalau menurut saya itu, dari Kabupaten mentransferkan anggaran kedesa lalu desa mentransfer kekegiatan, lalu transfer juga kepenjual. Waktu lalu 2018, tidak seperti itu. Jadi, cukup dari kabupaten transfer kerekening desa tinggal di ambil oleh bendahara desa, tetapi sekarang ini terlalu ribet karena terlalu banyak di transferkan, seperti udah masuk kerekening desa di transfer kepelaksana kegiatan, udah pelaksana kegiatan masuk lalu ditransfer ke toko-toko yang menjual kebutuhan untuk dibeli.

Dari ungkapan partisipan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada aspek struktur birokrasi dalam implementasi penerapan aplikasi system keuangan desa ini dinilai terlalu panjang dan berbelit-belit. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang ada pada implementasi penerapan aplikasi system keuangan desa secara mekanisme sudah dipahami dengan baik dan dijalankan sesuai SOP. Namun terjadinya perubahan mekanisme yang menyebabkan rantai birokrasinya berubah, dinilai makin rumit oleh para pelaksana kebijakan. Perubahan mekanisme transfer keuangan yang melibatkan pihak yang lebih banyak dinilai menjadi tidak sesederhana sebelumnya.

Di sini kita melihat bahwa perubahan mekanisme struktur birokrasi berdampak pada sumber daya dalam implementasi kebijakan. Selain itu, pada pelaksanaannya akan melibatkan komunikasi yang makin panjang pula sehingga dapat juga dikatakan bahwa perubahan pada aspek struktur birokrasi akan berdampak pada aspek komunikasi. Semakin para pelaksana kebijakan merasa sulit maka berpotensi pada tingkat rejection (penolakan) yang semakin besar. Di sini menunjukkan adanya dampak tidak langsung akibat perubahan birokrasi yaitu ikut berpengaruh pada aspek disposisi. Oleh karena itu, dari kasus ini peneliti berpendapat bahwa semakin sederhana birokrasi dan oleh operator dinilai semakin mudah untuk dilaksanakan maka akan berdampak pada semakin pendeknya rentang komunikasi yang kemudian akan lebih berpotensi menyebabkan efektifnya komunikasi dan juga berdampak pada semakin besarnya disposisi para pelaksana kebijakan dalam implementasi suatu kebijakan. Dengan demikian, peluang pencapaian keberhasilan pada implementasi kebijakan menjadi lebih besar.

KESIMPULAN

Aspek Komunikasi, pada aspek ini komunikasi dan koordinasi sudah terjalin dengan baik diantara para pelaksana, yaitu operator Siskeudes di tingkat Desa dan Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di kabupaten, BPK dan Kejaksan sebagai pengedali dan pengawas pelaksanaan. Namun demikian, pada aspek ini ditemui persoalan berupa miskomunikasi dan tumpang tindih perintah yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penginputan data. Aspek komunikasi mempengaruhi aspek sumber daya dan berdampak pada inefisiensi dalam pencapaian keberhasilan kebijakan.

Aspek Sumber Daya, penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung implementasi penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah berjalan dengan baik. Hanyasaja pada aspek sumber daya ini juga terjadi kelemahan yaitu terjadinya human error berupa kesalahan dalam proses penginputan akibat adanya miskomunikasi. Selain itu, terdapat permasalahan yang disebabkan karena lingkungan eksternal organisasi yaitu berupa lemahnya jaringan internet dan prasarana seperti laptop dan computer untuk para aparatur pelaksana sehingga pelaksanaan penggunaan aplikasi Siskeudes menjadi terkendala. Infrastruktur kebijakan menjadi

factor strategis dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi Siskeudes. Infrastruktur jaringan internet menjadi urat nadi bagi penyelenggaraan pemerintahan berbasis aplikasi online.

Aspek Disposisi, perkembangan aplikasi Siskeudes yang telah berkembang dari offline menjadi online menyebabkan operator merasa kesulitan. Hal ini dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya yakni berkaitan dengan persoalan pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman terhadap implementasi kebijakan mengenai aplikasi siskeudes. Pelaksanaan penggunaan aplikasi Sikeudes dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa berbasis online yang dinilai rumit oleh para operator menyebabkan adanya bentuk rejection dari pelaksana kebijakan. Semakin sederhana dan dinilai tidak rumit suatu kebijakan oleh para pelaksana maka disposisi akan semakin besar sehingga potensi pencapaian keberhasilan implementasi kebijakanaan semakin besar pula.

Aspek Struktur Birokrasi, struktur birokrasi yang ada pada implementasi penggunaan aplikasi Siskeudes secara mekanisme sudah dipahami dengan baik dan dijalankan sesuai SOP oleh para pelaksana di DesaTanjung Baru. Namun perubahan mekanisme terjadi dan menyebabkan rantai birokrasi dinilai makin rumit oleh para pelaksana kebijakan. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa semakin sederhana birokrasi dan oleh operator dinilai semakin mudah untuk dilaksanakan maka akan berdampak pada semakin pendeknya rentang komunikasi yang kemudian akan lebih berpotensi menyebabkan efektifnya komunikasi dan juga berdampak pada semakin besarnya disposisi para pelaksana kebijakan dalam implementasi suatu kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. (1999). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (2nd Ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy (1st Ed.; R. L. Peabody, Ed.). Washington D.C.: Qongressional Quarterly Press
- Firdausy, C. M., Suryana, A., Nugroho, R., &Suhartoko, Y. B. (2019). Prosiding Seminar Nasional Bagian I Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. In Revolusi Industri 4.0 Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (Pp. 1–222).
- Harmiati, Alexsander, Triyanto, D., Maya, M., &Riastuti, F. (2020). Analisis Pemetaan Collaborative Governance Dalam Program Keluarga Berencana Di Kota Bengkulu. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(1). <https://doi.org/10.32663/jpsp.v9i1>
- Harmiati, H., Mulyadi, M., Suri, E. W., &Triyanto, D. (2019). Analisis Pemberian Dana Desa Dalam Penurunan Angka Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu. *Mimbar :Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 8(1), 23–30. <https://doi.org/10.32663/jpsp.v8i1.833>
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., &Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah Analysis Of The Impact Of Management And Use Of Village Funds On Regional Development, 6(1), 14–24.
- Malahika, J. M., Karamoy, H., &Pusung, R. J. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Goung Concer*, 13(4), 578–583.

- Munti, F. (2017). Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 172–182. <https://doi.org/10.18196/Jai.180281>
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (Revisi)*. Bandung :Remajarosdakarya.
- Miles, Matthew B. Dan Huberman, A. Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, 1st Ed., Vol. 1. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Puspasari, O. R., &Purnama, D. (2018). Implementasi System Keuangan Desa Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(2), 145–159.
- Pratiwi, D. N., &Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Penggunaan Siskeudes Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 217–223.
- Triyanto, D. (2018). Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 7(2), 56–62. <https://doi.org/10.32663/Jpsp.V7i2.669>